

BAB 5

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan metode System GMM terhadap data panel 14 negara, delapan variabel utama dianalisis untuk melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel-variabel tersebut meliputi GDP sebagai variabel dependen, *Foreign Direct Investment (FDI)*, *Gross Fixed Capital Formation (GFCF)*, empat indikator tata kelola kelembagaan (*Political Stability*, *Control of Corruption*, *Government Effectiveness*, dan *State Fragility*), serta Global Islamic Economy Indicator (GIEI). Dari analisis tersebut disimpulkan maka dapat disimpulkan, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil temuan analisis deskriptif mengenai *Foreign Direct Investment*, *Gross Fixed Capital Formation*, Stabilitas Politik, *State Fragility*, *Control of Corruption*, *Government Effectiveness*, dan *Global Islamic Economy Indicator* sebagai berikut:
 - a. Selama periode 2014–2023, kontribusi FDI terhadap PDB di negara–negara SGIE menunjukkan variasi yang tajam. **Qatar** secara konsisten mencatat angka tertinggi rata-rata **26,6%**, dengan puncak **35,1% pada 2023** menandakan keberhasilan dalam membangun iklim investasi inklusif, terutama di sektor halal dan teknologi. Sebaliknya, **Kuwait** menempati posisi paling rendah, dengan FDI yang stagnan dan bahkan menyentuh **0,1% pada 2022**, akibat ketergantungan minyak dan reformasi ekonomi yang terbatas. Perbedaan ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan pasar terbuka dan keberlanjutan kerangka hukum adalah kunci untuk menarik investasi global.
 - b. Sepanjang periode 2014–2023, GFCF di negara-negara SGIE menunjukkan pola yang relatif stabil, namun terdapat disparitas signifikan dalam intensitas belanja modal tetap antarnegara. **Qatar** secara konsisten mencatat nilai tertinggi, mencapai rata-rata sekitar 59% dari PDB, yang mencerminkan strategi pembangunan infrastruktur berskala besar dan investasi jangka panjang pada sektor energi serta industri halal. **Malaysia**

- c. juga berada di kelompok atas dengan komitmen kuat pada pengembangan kawasan industri dan fasilitas pendukung ekosistem halal. Sebaliknya, **Sudan** dan **Pakistan** menempati posisi terendah akibat keterbatasan ruang fiskal, instabilitas politik, dan rendahnya arus modal masuk, yang menghambat realisasi investasi produktif. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan belanja modal tetap sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kestabilan politik, dan visi pembangunan jangka panjang yang konsisten.
- d. Sepanjang 2014–2023, indeks stabilitas politik di negara-negara SGIE memperlihatkan pola yang relatif homogen dengan rata-rata pada tingkat sedang hingga rendah. **Singapura** tampil sebagai negara paling stabil secara politik sepanjang periode observasi, yang ditunjang oleh sistem pemerintahan yang kuat, kepastian hukum, dan rendahnya konflik sosial. Sebaliknya, **Sudan** menempati posisi paling tidak stabil hampir setiap tahun karena disrupsi politik, transisi pemerintahan, dan konflik domestik. Variabel ini terus menunjukkan bahwa stabilitas politik adalah fondasi bagi pembangunan ekonomi dan reformasi kebijakan yang berkelanjutan.
- e. Selama satu dekade observasi 2014–2023, variabel SF menunjukkan perbedaan ekstrem antarnegara SGIE, dengan variasi yang paling luas dibanding variabel lain. **Sudan** secara konsisten menduduki posisi dengan fragilitas tertinggi akibat konflik bersenjata, instabilitas pemerintahan, dan krisis kemanusiaan. Sementara **Singapura** menempati posisi terendah, mencerminkan kekokohan institusional dan ketahanan sistem sosial-politik. Perbedaan ini menegaskan bahwa kapasitas negara dalam menghadapi tekanan domestik dan eksternal menjadi determinan penting untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan tahan krisis.
- f. Dalam periode 2014–2023, variabel *Control of Corruption* (CoC) menunjukkan rata-rata yang relatif seragam di sebagian besar negara SGIE, namun tetap terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat efektivitas pengendalian korupsi. **Singapura** secara konsisten mencatat performa terbaik, mencerminkan keberhasilan sistem hukum yang kuat, transparansi

birokrasi, dan akuntabilitas publik yang tinggi. Sebaliknya, **Sudan** dan **Pakistan** menempati posisi terbawah, dengan permasalahan korupsi yang bersifat struktural dan meresap hingga ke tingkat implementasi kebijakan. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan transparansi, penguatan kelembagaan, dan penegakan hukum yang tegas tetap menjadi agenda mendesak dalam memperkuat fondasi pembangunan ekonomi negara-negara Muslim.

- g. Dalam periode 2014–2023, variabel Government Effectiveness (GE) menunjukkan kestabilan relatif di sebagian besar negara SGIE, meskipun perbedaan kapasitas kelembagaan tetap signifikan. **Singapura, Uni Emirat Arab, dan Malaysia** secara konsisten mencatat skor tertinggi, mencerminkan birokrasi yang efisien, kualitas layanan publik yang baik, serta implementasi kebijakan pembangunan yang terencana. Sebaliknya, **Sudan** dan **Iran** berada di posisi terbawah, menghadapi kendala serius seperti lemahnya tata kelola, rendahnya kapasitas birokrasi, dan terbatasnya koordinasi kebijakan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas pemerintahan merupakan faktor kunci dalam menciptakan stabilitas ekonomi, memperkuat daya saing, dan memastikan keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan jangka panjang di negara-negara Muslim.
- h. Dalam periode 2014–2023, skor Global Islamic Economy Indicator (GIEI) menunjukkan tren pertumbuhan yang bervariasi di antara negara-negara SGIE, mencerminkan perbedaan dalam pengembangan sektor ekonomi Islam. **Malaysia** secara konsisten menempati posisi tertinggi, didorong oleh ekosistem halal yang matang, regulasi yang mendukung, serta inovasi di sektor keuangan syariah, makanan halal, dan pariwisata ramah Muslim. Sebaliknya, **Iran** berada di posisi terbawah, dipengaruhi oleh keterbatasan akses pasar global, sanksi ekonomi, dan lemahnya infrastruktur pendukung industri halal. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi Islam sangat bergantung pada sinergi kebijakan, dukungan kelembagaan, dan keterhubungan dengan pasar global.

2. ***Foreign Direct Investment (FDI)*** menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dalam model System Generalized Method of Moments (SYS-GMM) baik pada jangka pendek maupun jangka panjang. Pada jangka pendek, FDI memiliki koefisien positif sebesar 0,108 dan signifikan pada tingkat 5% ($p = 0,020$), menandakan bahwa peningkatan arus modal asing berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara SGIE. Pada jangka panjang, koefisien FDI meningkat signifikan menjadi 0,351 ($p = 0,001$), menunjukkan bahwa efek akumulatif dari investasi asing memberikan dampak yang jauh lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dalam periode yang lebih panjang. Ini menegaskan bahwa selain manfaat langsung, FDI juga berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi, inovasi, dan daya saing ekonomi secara berkelanjutan. Distribusi pengaruh FDI di antara negara-negara SGIE juga bervariasi, dengan kontribusi tertinggi berasal dari **Pakistan (59,6%)**, **Indonesia (5,05%)**, dan **Qatar (8,39%)**. Meskipun Pakistan memiliki tantangan besar terkait stabilitas politik dan tata kelola, investasi asing yang masuk tetap menjadi sumber penting bagi pembangunan sektor strategisnya. Secara keseluruhan, optimalisasi FDI sangat tergantung pada stabilitas politik, tata kelola yang baik, dan keselarasan kebijakan investasi dengan prioritas pembangunan nasional. Kontrol korupsi berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, sedangkan kerentanan negara memberi dampak negatif. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat insentif fiskal, meningkatkan kualitas birokrasi, dan menjaga kesinambungan kebijakan untuk mendukung investasi yang produktif dan berkelanjutan.
3. ***Gross Fixed Capital Formation (GFCF)*** menunjukkan koefisien positif tetapi tidak signifikan secara statistik dalam model awal SYS-GMM, dengan $p = 0.114$. Ketidaksignifikanan ini bisa dipahami secara logis dan metodologis karena efek investasi domestik terhadap pertumbuhan sering kali bersifat jangka menengah-panjang. Keterlambatan dampak (lag effect) pembangunan infrastruktur, aset tetap, atau fasilitas publik bisa mengaburkan hubungan langsung dalam jangka waktu pengamatan sepuluh

tahun. Pada jangka panjang, GFCF justru menunjukkan koefisien negatif sebesar -0,139 dengan nilai p sebesar 0,300 yang tidak signifikan secara statistik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembentukan modal tetap dalam periode yang lebih panjang belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini diduga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, efektivitas alokasi investasi, serta kelembagaan yang belum mendukung optimalisasi manfaat investasi modal tetap. Oleh karena itu, meskipun GFCF berpotensi mendukung peningkatan kapasitas produksi dan pembangunan infrastruktur, reformasi kelembagaan dan kebijakan yang tepat diperlukan untuk memaksimalkan kontribusinya dalam jangka panjang. Distribusi pengaruh GFCF terbesar ditemukan di **Uni Emirat Arab** (28,54%), **Singapura** (14,11%), dan **Pakistan** (13,54%). UAE memanfaatkan GFCF untuk megaprojek transformasi ekonomi, seperti pembangunan kota pintar dan transisi energi hijau. Singapura mengalokasikan investasi pada pengembangan pelabuhan dan infrastruktur digital yang memperkuat posisi dalam rantai nilai global. Pakistan, meskipun menghadapi tantangan stabilitas politik, menjadikan GFCF sebagai tumpuan dalam pembangunan infrastruktur energi melalui proyek besar seperti CPEC.

4. **Stabilitas Politik (PS)** dalam model System Generalized Method of Moments (SYS-GMM) menunjukkan koefisien positif namun tidak signifikan secara statistik pada jangka pendek, dengan p sebesar 0,870. Ini menandakan bahwa dalam jangka pendek, variasi stabilitas politik belum berkontribusi secara langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara SGIE. Ketidaksignifikanan ini mungkin disebabkan oleh adanya faktor-faktor lain yang lebih dominan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam waktu singkat, atau dampak stabilitas politik yang cenderung muncul dalam jangka waktu lebih panjang. Pada jangka panjang, stabilitas politik juga menunjukkan koefisien negatif sebesar -68,36 dengan nilai p sebesar 0,340, yang berarti tidak signifikan secara statistik. Hasil ini mengindikasikan bahwa perubahan stabilitas

politik selama periode yang lebih panjang belum terbukti memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di negara-negara SGIE. Volatilitas dan ketidakpastian politik tetap menjadi risiko potensial yang dapat menghambat investasi dan pembangunan jika tidak dikelola dengan baik. Namun, distribusi pengaruh stabilitas politik antar negara menunjukkan variasi yang cukup besar. Negara dengan kontribusi terbesar terhadap pengaruh stabilitas politik adalah **Qatar** (18,40%), diikuti oleh **Jordan** (16,42%) dan **Saudi Arabia** (10,03%). Negara lain seperti **Iran** (9,68%), **UAE** (8,21%), **Bahrain** (7,66%), dan **Indonesia** (7,00%) juga memberikan kontribusi cukup berarti. Sementara itu, negara dengan persentase pengaruh paling rendah adalah **Oman** (0,55%), **Malaysia** (1,19%), dan **Singapore** (1,92%). Meski secara total pengaruhnya belum signifikan secara statistik, distribusi ini menggambarkan peran relatif penting stabilitas politik di beberapa negara tertentu dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Meskipun demikian, secara umum pengaruh stabilitas politik terhadap pertumbuhan di kawasan SGIE masih bersifat kompleks dan memerlukan perhatian kebijakan yang berkelanjutan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan pembangunan ekonomi.

5. *State Fragility* (SF) dalam model (SYS-GMM) menunjukkan koefisien negatif yang hampir signifikan secara statistik pada jangka pendek, dengan nilai p sebesar 0,050 dan koefisien sebesar -0,0507. Ini mengindikasikan bahwa dalam jangka pendek, peningkatan kerentanan negara (*state fragility*) cenderung memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara SGIE. Pada jangka panjang, koefisien *State Fragility* berubah menjadi positif sebesar 0,0512 namun tidak signifikan secara statistik dengan nilai p sebesar 0,601. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam periode yang lebih panjang, fragilitas negara tidak memberikan pengaruh yang signifikan atau konsisten terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara SGIE. Meskipun demikian, tanda positif yang tidak signifikan ini bisa saja menunjukkan adanya mekanisme adaptasi atau

kompensasi dalam jangka panjang, di mana negara-negara dengan fragilitas tertentu mencoba mengatasi tantangan tersebut untuk menjaga pertumbuhan. Distribusi pengaruh State Fragility antar negara juga memperlihatkan variasi yang cukup besar. Negara dengan kontribusi pengaruh terbesar berasal dari **Bahrain** (16,98%), **Iran** (14,99%), dan **Turkiye** (14,78%). Negara-negara lain seperti **Singapore** (11,65%), **UAE** (8,13%), dan **Sudan** (8,08%) juga memberikan kontribusi cukup berarti. Sebaliknya, negara dengan pengaruh fragilitas terendah adalah **Kuwait** (0,71%), **Qatar** (1,07%), dan **Pakistan** (1,31%). Variasi distribusi ini menunjukkan bahwa dampak kerentanan negara terhadap pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada konteks dan kapasitas masing-masing negara dalam mengelola risiko sosial-politik dan institusional. Secara keseluruhan, *State Fragility* memiliki pengaruh negatif yang mendekati signifikan dalam jangka pendek, menandakan bahwa fragilitas negara dapat menjadi hambatan langsung bagi pertumbuhan ekonomi jika tidak dikelola dengan baik. Di sisi lain, dalam jangka panjang pengaruhnya tidak signifikan, yang mengindikasikan perlunya kebijakan berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan dan kapasitas institusional agar pertumbuhan ekonomi dapat terjaga secara berkelanjutan di kawasan SGIE.

6. ***Control of Corruption (CoC)*** dalam model (SYS-GMM) pada jangka pendek menunjukkan koefisien positif sebesar 0,171, namun tidak signifikan secara statistik dengan nilai p sebesar 0,722. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam jangka pendek, variasi pengendalian korupsi belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara dalam (SGIE). Meskipun demikian, arah koefisien yang positif menunjukkan adanya potensi dampak positif dari pengendalian korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun efeknya mungkin tertunda atau dipengaruhi oleh faktor lain dalam jangka pendek. Berbeda dengan hasil jangka pendek, pada analisis jangka panjang, variabel *Control of Corruption* menunjukkan pengaruh yang sangat kuat dan signifikan secara statistik dengan koefisien sebesar 141,30 dan nilai p 0,003.

Hasil ini menegaskan bahwa pengendalian korupsi yang lebih baik berkontribusi secara signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Dampak pengendalian korupsi yang berkelanjutan dapat meningkatkan kepercayaan investor, memperbaiki efisiensi alokasi sumber daya, dan memperkuat institusi yang mendukung iklim bisnis yang sehat serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Distribusi pengaruh pengendalian korupsi antar negara menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Negara dengan kontribusi terbesar terhadap pengaruh *Control of Corruption* adalah **Kuwait** (14%), diikuti oleh **Indonesia** (13%) dan **Bahrain** serta **Turkiye** dan **UAE** yang masing-masing berkontribusi sebesar 9%. Negara lain seperti **Oman** (8%), **Singapore** (8%), **Iran** (7%), **Pakistan** (6%), dan **Qatar** (6%) juga menunjukkan pengaruh yang berarti. Sedangkan **Saudi Arabia** memberikan kontribusi paling rendah dengan persentase 0%. Negara lain seperti **Jordan** (4%), **Sudan** (5%), dan **Malaysia** (2%) memberikan kontribusi yang relatif kecil. Meskipun secara keseluruhan variabel ini menunjukkan hasil yang positif dan mendukung pertumbuhan ekonomi, perbedaan distribusi pengaruh antar negara mengindikasikan bahwa efektivitas pengendalian korupsi sangat dipengaruhi oleh konteks kelembagaan dan kebijakan nasional masing-masing negara. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi yang berkelanjutan dan penguatan tata kelola pemerintahan menjadi kunci strategis untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif dan meningkatkan daya saing negara-negara SGIE.

7. ***Government Effectiveness (GE)*** dalam model (SYS-GMM) pada jangka pendek menunjukkan koefisien positif sebesar 0,472, namun tidak signifikan secara statistik dengan nilai p sebesar 0,526. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam jangka pendek, peningkatan efektivitas pemerintahan belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara dalam (SGIE). Meskipun demikian, arah koefisien yang positif menunjukkan potensi peran efektivitas pemerintahan dalam mendukung aktivitas ekonomi yang

produktif, meskipun dampaknya mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk terwujud. Pada analisis jangka panjang, variabel *Government Effectiveness* menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan secara statistik dengan koefisien sebesar -84,26 dan nilai *p* sebesar 0,001. Hasil ini mengindikasikan bahwa, dalam jangka panjang, peningkatan efektivitas pemerintahan justru berkorelasi dengan penurunan pertumbuhan ekonomi di negara-negara SGIE. Temuan ini dapat mencerminkan kompleksitas hubungan antara efektivitas kelembagaan pemerintah dan dinamika ekonomi makro di kawasan tersebut, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor struktural, kebijakan, atau kondisi eksternal yang spesifik. Distribusi pengaruh efektivitas pemerintahan antar negara menunjukkan variasi yang mencolok. Negara dengan kontribusi terbesar terhadap pengaruh *Government Effectiveness* adalah **Bahrain** dengan persentase sebesar 31%, diikuti oleh **UAE** (10%) dan **Malaysia** serta **Pakistan** yang masing-masing berkontribusi 9%. Negara-negara lain seperti **Qatar**, **Saudi Arabia**, **Singapore**, **Sudan**, dan **Turkiye** memberikan kontribusi yang relatif seimbang, masing-masing sebesar 6%. Sebaliknya, negara seperti **Indonesia** (2%), **Jordan** (1%), **Kuwait** (0%), dan **Oman** (3%) memberikan kontribusi paling kecil dalam konteks ini. Variasi distribusi ini menggambarkan perbedaan kapasitas kelembagaan dan efektivitas pemerintahan yang berdampak pada kemampuan masing-masing negara dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, meskipun efektivitas pemerintahan pada jangka pendek belum menunjukkan pengaruh signifikan dan jangka panjang menunjukkan korelasi negatif, kajian lebih mendalam diperlukan untuk memahami mekanisme dan kondisi khusus yang memengaruhi hubungan tersebut. Kebijakan yang menyesuaikan karakteristik kelembagaan nasional tetap menjadi kunci untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di kawasan SGIE.

8. *Global Islamic Economy Indicator (GIEI)* dalam model (SYS-GMM) menunjukkan koefisien positif sebesar 0,032 dengan signifikansi statistik pada tingkat 5% ($p = 0,046$). Hal ini menandakan bahwa peningkatan skor

GIEI berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara (SGIE) dalam jangka pendek. Hasil ini mengindikasikan bahwa pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang semakin baik dapat mendorong aktivitas ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan di kawasan tersebut. Pada analisis jangka panjang, variabel GIEI juga mempertahankan pengaruh positif yang signifikan dengan koefisien sebesar 0,033 dan nilai p yang sangat signifikan yaitu 0,000. Temuan ini memperkuat peran strategis ekosistem ekonomi syariah sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang di negara-negara SGIE, melalui peningkatan inklusi keuangan, investasi, serta aktivitas ekonomi yang berbasis prinsip syariah. Distribusi pengaruh GIEI antar negara menunjukkan variasi yang cukup besar. Negara dengan kontribusi terbesar adalah **Sudan** (29%), diikuti oleh **Oman** (19%) dan **Pakistan** (10%). Negara lain seperti **Bahrain** (9%), **Kuwait** (8%), **Qatar** dan **Singapore** yang masing-masing berkontribusi 7%, serta **Indonesia** (5%) juga memberikan dampak yang signifikan. Sebaliknya, beberapa negara seperti **Iran** (0%), **Malaysia** (1%), **Saudi Arabia** (1%), **Jordan** (1%), dan **Turkiye** (1%) memberikan kontribusi yang relatif kecil, sementara **UAE** berkontribusi 3%. Variasi distribusi ini menggambarkan perbedaan tingkat pengembangan dan pemanfaatan ekosistem ekonomi syariah yang berdampak pada kemampuan masing-masing negara dalam memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi melalui sektor ini. Oleh karena itu, penguatan dan perluasan ekosistem ekonomi syariah harus terus didorong sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan di kawasan SGIE.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

5.2.1 Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori pertumbuhan ekonomi dengan menegaskan kembali

Vioriza Qiyaski Buchari, 2025

HUBUNGAN DINAMIS ANTARA STABILITAS POLITIK, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, DAN EKOSISTEM SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA TOP 14 STATE GLOBAL ISLAMIC ECONOMY PERIODE 2014-2023

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

peran krusial investasi modal, yang dalam hal ini diwakili oleh *Foreign Direct Investment (FDI)* dan *Gross Fixed Capital Formation (GFCF)*. Sesuai dengan teori pertumbuhan klasik dan model pertumbuhan endogen, akumulasi modal merupakan salah satu pendorong utama peningkatan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Temuan empiris dalam penelitian ini mendukung gagasan tersebut dengan menunjukkan bahwa FDI dan GFCF berkontribusi positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang menjadi fokus studi. Hal ini menguatkan asumsi bahwa investasi, baik domestik maupun asing, menyediakan sumber daya finansial dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonomi.

Lebih lanjut, penelitian ini menguatkan relevansi teori kelembagaan dalam konteks pembangunan ekonomi. Variabel-variabel kelembagaan seperti *Political Stability*, *Control of Corruption*, *Government Effectiveness*, dan *State Fragility* yang dianalisis dalam penelitian ini menegaskan pentingnya kualitas tata kelola sebagai fondasi yang memungkinkan kebijakan ekonomi dan investasi dapat berjalan efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kelembagaan yang stabil dan efektif memberikan sinyal positif kepada pelaku ekonomi, menurunkan risiko investasi, serta mempermudah implementasi kebijakan pembangunan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas literatur kelembagaan yang menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro saja, melainkan juga oleh faktor sosial-politik dan kelembagaan yang mendukung keberlanjutan ekonomi.

Selain itu, penggabungan *Global Islamic Economy Indicator (GIEI)* sebagai variabel dalam model analisis menambah dimensi baru dalam kajian teori pertumbuhan ekonomi, khususnya pada konteks negara-negara dengan ekonomi Islam yang dominan. Temuan yang menunjukkan pengaruh GIEI terhadap pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwa aspek budaya, nilai-nilai, dan mekanisme ekonomi berbasis syariah memiliki peranan signifikan dalam membentuk pola pertumbuhan ekonomi. Hal ini

mengusulkan bahwa model pertumbuhan ekonomi tradisional perlu diperluas dengan memasukkan variabel-variabel yang berkaitan dengan identitas dan sistem ekonomi khusus, sehingga mampu menjelaskan dinamika ekonomi secara lebih holistik dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini memberikan dasar teoritis untuk pengembangan model-model pertumbuhan yang mengintegrasikan dimensi ekonomi Islam sebagai faktor yang memengaruhi kinerja ekonomi makro.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan multidisiplin dalam memahami pertumbuhan ekonomi, menggabungkan teori investasi, kelembagaan, dan aspek budaya ekonomi. Temuan ini membuka ruang bagi pengembangan teori yang lebih komprehensif dan kontekstual, yang tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi murni tetapi juga faktor kelembagaan dan kultural sebagai variabel penentu dalam proses pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang, khususnya di wilayah dengan ekonomi Islam yang signifikan. Pendekatan ini dapat menjadi pijakan bagi studi-studi selanjutnya yang ingin mengeksplorasi keterkaitan antara faktor-faktor tersebut secara lebih mendalam dan aplikatif.

2. Implikasi Praktis

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat sejumlah implikasi praktis yang dapat dijadikan panduan bagi pembuat kebijakan, pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

1. Penguatan Iklim Investasi: Pemerintah perlu fokus menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan cara menyederhanakan regulasi dan prosedur perizinan usaha, meningkatkan transparansi, serta memberikan insentif fiskal yang menarik bagi investor domestik maupun asing. Pengembangan infrastruktur fisik dan digital yang memadai juga menjadi kunci utama untuk menarik investasi berkualitas yang dapat meningkatkan kapasitas produksi nasional.

2. Reformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan: Mengingat pentingnya stabilitas politik, efektivitas pemerintahan, dan kontrol korupsi yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, diperlukan program reformasi kelembagaan yang menyeluruh. Ini mencakup penguatan lembaga anti-korupsi, peningkatan kapasitas birokrasi, serta penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas yang ketat agar kepercayaan investor dan masyarakat tetap terjaga.
3. Pengembangan Ekonomi Syariah: Dengan ditemukannya pengaruh signifikan *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI), pemerintah dan sektor swasta dianjurkan untuk mengembangkan potensi ekonomi syariah lebih intensif. Langkah konkret dapat berupa penguatan regulasi dan standar syariah, ekspansi layanan keuangan syariah, pengembangan produk halal, serta peningkatan edukasi dan literasi ekonomi syariah kepada masyarakat luas.
4. Diversifikasi Sumber Pertumbuhan Ekonomi: Selain investasi dan kelembagaan, penting bagi negara-negara yang diteliti untuk memperluas basis ekonomi melalui diversifikasi sektor-sektor unggulan. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada komoditas atau sektor tertentu yang rentan terhadap fluktuasi pasar global, serta menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas nasional.
5. Penguatan Kerjasama Regional dan Internasional: Negara-negara yang menjadi fokus penelitian dapat memanfaatkan peluang kerjasama ekonomi regional dan internasional untuk memperluas akses pasar, transfer teknologi, serta meningkatkan arus investasi. Kerjasama yang harmonis akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan inklusif.
6. Pengelolaan Risiko dan Ketahanan Ekonomi: Mengingat adanya variabel kerentanan kelembagaan (*State Fragility*) yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan, negara-negara harus memperkuat sistem mitigasi risiko, baik dari sisi politik, sosial, maupun ekonomi. Upaya

peningkatan ketahanan ini akan memastikan keberlanjutan pembangunan di tengah berbagai tantangan global.

7. **Peningkatan Partisipasi Sektor Swasta:** Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang mendorong partisipasi aktif sektor swasta dalam pembangunan ekonomi, termasuk melalui kemudahan akses pembiayaan, insentif inovasi, dan kerjasama publik-swasta (*public-private partnership*). Peran sektor swasta sangat penting dalam mempercepat pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

5.2.2 Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah/Regulator

Pemerintah di negara-negara yang dianalisis perlu menjadikan penguatan kelembagaan sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan jangka panjang. Hal ini mencakup reformasi menyeluruh pada aspek efektivitas pemerintahan, pengendalian korupsi, dan stabilitas politik. Ketiga komponen tersebut terbukti saling memperkuat dan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan lintas sektoral dan kelembagaan yang terkoordinasi, termasuk pembentukan unit khusus untuk perbaikan birokrasi, supremasi hukum, dan tata kelola yang transparan.

Di sisi lain, strategi untuk menarik dan mengelola investasi asing langsung (FDI) juga harus disesuaikan dengan tantangan struktural masing-masing negara. Negara seperti Pakistan, Iran, dan Sudan yang masih menghadapi hambatan hukum dan politik, perlu membangun iklim investasi yang lebih ramah melalui reformasi hukum, peningkatan infrastruktur, serta penyediaan insentif berbasis kinerja bagi investor. Hal ini penting untuk

memastikan bahwa FDI tidak hanya masuk, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap transformasi ekonomi nasional.

Selain itu, penguatan *Gross Fixed Capital Formation* (GFCF) harus diarahkan pada sektor-sektor strategis yang dapat meningkatkan produktivitas jangka panjang, seperti infrastruktur dasar, kawasan industri, dan konektivitas logistik. Pemerintah juga perlu menerapkan sistem penganggaran dan evaluasi proyek berbasis hasil agar belanja modal benar-benar mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, kebijakan pembangunan perlu disesuaikan untuk memperkuat kontribusi ekonomi berbasis syariah, khususnya di negara seperti Indonesia, Malaysia, dan UAE. Integrasi sektor halal, keuangan syariah, dan gaya hidup muslim dapat menciptakan pasar baru sekaligus memperkuat posisi ekonomi nasional dalam konteks global yang semakin menekankan nilai etis dan keberlanjutan.

Terakhir, dalam menghadapi risiko fragilitas dan ketidakpastian global, pemerintah perlu memperkuat respons kelembagaan melalui sistem peringatan dini, koordinasi fiskal yang adaptif, dan jaring pengaman sosial yang inklusif. Negara-negara yang memiliki kelembagaan tangguh terbukti lebih siap menghadapi guncangan, menjaga stabilitas makro, dan mempertahankan momentum pertumbuhan.

2. Bagi Organisasi Internasional

Organisasi internasional dan lembaga pembangunan seperti *UNDP*, *IMF*, *World Bank*, serta *Islamic Development Bank* perlu memberikan dukungan yang lebih terarah dalam memperkuat fondasi kelembagaan di negara-negara berkembang dan berisiko tinggi. Program-program bantuan teknis, pembiayaan reformasi birokrasi, serta penguatan sistem hukum dan antikorupsi harus diintegrasikan dalam skema kerja sama jangka panjang. Organisasi-organisasi ini juga dapat berperan sebagai fasilitator pembentukan kerangka kelembagaan regional, khususnya di kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan, untuk memperkuat koordinasi dan stabilitas kawasan.

Di samping itu, lembaga internasional perlu memperluas dukungannya terhadap investasi berkelanjutan dan berbasis syariah. Ini dapat dilakukan melalui platform kolaboratif, penjaminan risiko politik, serta penyusunan standar ESG dan halal yang lebih universal. Dengan demikian, negara-negara yang belum memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat tetap dapat menarik investasi yang bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.

Dalam konteks ekonomi Islam, organisasi seperti IDB dan OIC dapat berperan lebih aktif dalam membantu negara-negara anggota memperluas implementasi *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI), termasuk dalam aspek regulasi, promosi global, dan pengembangan pasar. Negara-negara dengan potensi besar namun belum optimal seperti Pakistan dan Iran akan sangat terbantu melalui asistensi dalam penyusunan kebijakan dan integrasi sistem ekonomi syariah secara menyeluruh.

3. Bagi Investor Asing

Investor asing disarankan untuk mempertimbangkan secara cermat kualitas tata kelola negara tujuan investasi, termasuk stabilitas politik, efektivitas pemerintahan, dan tingkat korupsi, karena faktor-faktor ini terbukti memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi. Negara dengan kelembagaan yang kuat cenderung menawarkan risiko yang lebih rendah dan prospek jangka panjang yang lebih stabil. Selain itu, peluang investasi dapat difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, industri berbasis modal tetap (GFCF), dan ekonomi syariah terutama sektor halal, keuangan syariah, dan pariwisata halal yang menunjukkan potensi besar di kawasan. Untuk meningkatkan keberhasilan investasi, investor juga disarankan menjalin kemitraan dengan pelaku lokal dan memahami regulasi serta norma budaya yang berlaku. Pendekatan yang kontekstual dan kolaboratif akan memperkuat posisi investor dalam pasar yang berkembang pesat ini.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperdalam kajian mengenai peran kualitas kelembagaan dalam memediasi hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara mayoritas Muslim. Meskipun penelitian ini telah menunjukkan bahwa variabel-variabel seperti *political stability*, *control of corruption*, dan *government effectiveness* memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi, pendekatan pengukuran variabel kelembagaan dapat lebih diperluas, baik melalui indeks gabungan berbasis teori maupun pendekatan statistik seperti *Principal Component Analysis* (PCA). Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih antar indikator yang sering kali mengukur dimensi institusional serupa, sekaligus memberikan interpretasi yang lebih konsisten dan representatif terhadap fenomena tata kelola di masing-masing negara.

Selain itu, peneliti di masa mendatang diharapkan dapat mempertimbangkan faktor kontekstual yang lebih dinamis, seperti siklus politik, transisi kekuasaan, atau krisis geopolitik yang memengaruhi stabilitas politik dan iklim investasi. Variabel dummy politik atau indeks risiko politik tahunan dapat menjadi pelengkap untuk menjelaskan fluktuasi pertumbuhan ekonomi jangka pendek yang tidak tertangkap dalam variabel kelembagaan konvensional. Penggunaan data frekuensi yang lebih tinggi atau pendekatan event-study juga dapat menjadi pilihan metodologis untuk menelaah dampak langsung dari ketidakstabilan politik terhadap sektor-sektor kunci, seperti industri halal atau keuangan syariah.

Rekomendasi lain yang penting adalah memperluas cakupan variabel ekonomi Islam dengan mengintegrasikan dimensi sosial dan keuangan syariah secara lebih komprehensif. Indeks *Global Islamic Economy* (GIEI) yang digunakan dalam penelitian ini merupakan langkah awal yang baik, namun peneliti berikutnya dapat memecah indikator tersebut ke dalam sub-sektor seperti makanan halal, pariwisata syariah, fintech syariah, wakaf produktif, dan lainnya, agar kontribusi masing-masing sektor terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dianalisis secara

terpisah. Ini akan memperkuat pemahaman terhadap bagaimana masing-masing pilar ekonomi Islam berinteraksi dengan struktur kelembagaan negara.

Akhirnya, dari segi pendekatan analisis, peneliti berikutnya disarankan untuk mengeksplorasi model-model alternatif seperti panel threshold regression, panel quantile regression, atau bahkan model machine learning berbasis data panel, guna menangkap non-linearitas atau pola heterogen antar negara. Mengingat kompleksitas hubungan antara kelembagaan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi, penggunaan pendekatan yang lebih fleksibel dapat membuka temuan-temuan baru, terutama dalam membedakan dampak kelembagaan pada negara-negara dengan karakteristik tertentu, seperti negara monarki vs demokrasi, atau negara berpendapatan rendah vs tinggi. Dengan pendekatan yang lebih tajam dan variabel yang lebih kaya, penelitian di masa depan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi perumusan kebijakan ekonomi Islam yang berbasis bukti dan konteks kelembagaan yang kuat.